# UPAYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA(KB) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

#### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana strata satu (S1)



Oleh:

RATMI SANDRA 2004 / 62816

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2009

#### ABSTRAK

# Ratmi Sandra. NIM/BP. 62816/2004. UPAYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PROGRAM KB BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program KB bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang merupakan program pemerintah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kelahiran terutama terjadi pada keluarga miskin yang akan berdampak kepada rendahnya kualitas Sumber daya Manusia. Selain itu penulisan ini juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program KB, faktor-faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Pendapat masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terhadap program KB

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskripsi. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, studi dokumenter dan studi kepustakaan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan data di analisis melalui analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan oleh UPTKB Kecamatan Kubung Kabupaten Solok melalui program KB bagi masyarakat miskin (1) Pencatatan dan pelaporan keluarga miskin yang dilakukan oleh kader, (2) Penyuluhan kepada masyarakat,(3) Pemberian KB gratis untuk masyarakat miskin. Kemudian dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut terdapat faktor-faktor penghambat yakni pertama, rendahnya motivasi kader dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Kedua, berbedanya indikator keluarga miskin menurut masing-masing instansi, Ketiga, sedikitnya jumlah PLKB ditingkat Kecamatan, sehingga PLKB akan kesulitan dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan KB, Keempat, Adanya tantangan bagi kader dalam menjalankan tugasnya ditengah masyarakat, Kelima, kurangnya kesadaran masyarakat miskin untuk hadir ketika adanya pemberian KB gratis untuk masyarakat miskin. Pandangan masyarakat terhadap program KB, yakni sebagian besar masyarakat setuju dengan pelaksanaan program KB, namun ada masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan melaksanakan program KB karena bisa menimbulkan efek samping yang tidak baik terhadap kesehatan tubuh

#### KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Pengendalian Pertumbuhan penduduk Melalui Program Keluarga Berencana bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata satu (SI) program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Ibu Henni Mucthar, SH. M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Ibu Dra. Al Rafni M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
- 3. Bapak Aldri Frinaldi, SH. M.Hum, Ibu Dra. Aina selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini
- 4. Bapak Dr. Dasril M.Ag selaku Penasehat Akademik

- Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
- Dosen dan Staf Administrasi Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmuilmu Sosial
- 7. Bapak Kepala Bagian KB/KR di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Solok, Bapak Kepala UPT KB di Kecamatan Kubung beserta PLKB, PPKBJ dan Sub PPKBJ di tingkat nagari dan jorong yang telah banyak membantu
- 8. Orang tua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moril maupun materil serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh pihak yang terkait yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritik dan perhatian yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Mai 2009

Penulis

# **DAFTAR ISI**

ABST	'RAK	i
KATA	A PENGANTAR	ii
DAFT	AR ISI	iv
DAFT	AR TABEL	vii
DAFT	AR LAMPIRAN	viii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah	11
C.	Fokus Penelitian	13
D.	Tujuan Penelitian	14
E.	Manfaat Penelitian	14
BAB 1	II KAJIAN TEORI	
A.	Pertumbuhan Penduduk	16
	Konsep Pertumbuhan Penduduk	16
	2. Faktor Penyebab Pertumbuhan	22
	3. Akibat Pertumbuhan Penduduk	26
	4. Pertumbuhan Penduduk Ditengah Kemiskinan	30
	a. Konsep Kemiskinan	30
	b. Akibat Pertumbuhan penduduk di tengan kemiskinan	39
B.	Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melelui Program	
	Keluarga Berencana	44
C.	Faktor Penghambat Upaya Pengendalian Pertumbuhan	
	Penduduk	51
D.	Kerangka Berfikir (Konseptual)	55
BAB I	III METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	58
B.	Lokasi penelitian	59
C.	Informan Penelitian	59

D.	Jenis dan Sumber Data	60
E.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	61
F.	Teknik uji Keabsahan Data	62
G.	Teknik Analisis Data	63
BAB IV	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	64
	1. Gambaran Umum Kabupaten Solok	64
	2. Upaya yang dilakukan oleh badan keluarga berencana dan	
	pemberdayaan perempuan dalam pengendalian	
	pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi	
	masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten	
	Solok	70
	a. Pencatatan dan pelaporan keluarga miskin	70
	b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat miskin	75
	c. Pemberian KB gratis kepada masyarakat miskin	76
	3. Faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk	
	melalui program keluarga berencana bagi masyarakat	
	miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	77
	a. Kendala pendataan keluarga miskin	77
	b. Kendala dalam penyuluhan kepada masyarakat miskin	80
	c. Kendala pemberian KB gratis kepada masyarakat	
	miskin	83
	4. Pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian	
	pertumbuhan penduduk melalui program KB di	
	Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	84
	a. Pandangan masyarakat miskin mengenai program KB	84
	b. Pandangan masyarakat miskin terhadap pelayanan KB	85
B.	Pembahasan	87
	1. Upaya yang dilakukan oleh badan keluarga berencana dan	
	pemberdayaan perempuan dalam pengendalian	
	pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi	

	masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten	
	Solok	87
2.	Faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk	
	melalui program keluarga berencana bagi masyarakat	
	miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	96
	a. Kendala pendataan keluarga miskin	96
	b. Kendala dalam penyuluhan kepada masyarakat miskin	99
	c. Kendala pemberian KB gratis kepada masyarakat	
	miskin	103
3.	Pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian	
	pertumbuhan penduduk melalui program KB di	
	Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	105
V P	ENUTUP	
Si	mpulan	108
Sa	ran-saran	109
	3. <b>V P</b> ?	<ol> <li>Faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok</li></ol>

# DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Solok
  Tahun 2006
- Tabel 1.2 Data Pasangan Usia Subur dan Jumlah Wanita Usia Subur di Kabupaten Solok Tahun 2006
- Tabel 1.3 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Solok tahun 2005, 2006, 2007
- Tabel 1.4 Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tingkat Nagari di Kecamatan Kubung Tahun 2007
- Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Solok
- Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kubung Tahun 2008
- Tabel 4.3 Data Jumlah Rumah Tangga Miskin Kecamatan Kubung tahun 2007
- Tabel 4.4 Data Jumlah Rumah Tangga Miskin Kecamatan Kubung tahun 2008
- Tabel 4.5 Tempat Pelaksanaan Pelayanan KB di Kecamatan Kubung
- Tabel 4.6 Struktur Organisasi UPT KB di Kecamatan Kubung
- Tabel 4.7 Mekanisme Arus Pendataan Keluarga Miskin
- Tabel 4.8Data Petugas PLKB dan Wilayah Binaannya

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

2 : Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu-ilmu Sosial

3 : Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Solok

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Pada tingkat dunia, Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat ke empat tingkat kepadatan penduduknya (Todara, 2004:296). Masalah utama tentang kependudukan yang dihadapi di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan kurang seimbangnya penyebaran serta struktur umur penduduknya. Keadaan penduduk yang demikian akan mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya dapat memperlambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Terkait dengan permasalahan tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia maka ada beberapa Kebijakan operasional pelaksanaan Program KB Nasional tahun 2007. Salah satu kebijakan operasional tersebut adalah Meningkatkan akses dan Kualitas Pelayanan KB, terutama untuk keluarga miskin (Pra sejahtera dan KS I) yang belum terakses dalam pelayanan Kontrasepsi. Dengan demikian, keluarga miskin harus mendapat pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang sempurna dan pelayanan KB yang berkualitas. Dalam rencana strategis Program Keluarga Berencana Nasional tahun 2005-2009, ada empat program utama yaitu Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan

Reproduksi Remaja, Program Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga, serta Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

Kemudian menurut Sosiolog dari UI, Imam B. Prasoja dalam diskusi Soal KB dan Kemiskinan (Majalah Polita, 18 Februari 2008) mengatakan bahwa Ledakan Penduduk itu akhirnya akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan, namun masih banyak perempuan yang tidak memahami maksud dan tujuan program KB guna meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai pendidikan yang rendah.

Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah jumlah anak, semakin besar jumlah anak dalam keluarga maka semakin besar tanggungan kepala rumah tangga, untuk itu pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Usaha pengendalian penduduk perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya tingkat kepadatan penduduk yang tinggi maka akan menimbulkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya salah satu upaya mengatasi pertumbuhan penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana (KB). Program KB merupakan upaya untuk membangun keluarga kecil yang sejahtera, bahagia dan mandiri seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan

bahwa keluarga berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang mempunyai angka *Total Fertilitas Rate* (TFR) atau angka kelahiran yang cukup tinggi. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, pada tahun 2007 diperoleh informasi tentang TFR Sumatera Barat 3.4 meningkat 0,2 point dibandingkan dengan SDKI 2002/2003 hanya 3,2, sedangkan peserta KB justru ada peningkatan dari 52,9 % menjadi 59,9 % (www.bkkbn.go.id/sumbar)

Hal ini merupakan suatu yang tidak singkron, jika peserta KB meningkat seharusnya TFR atau angka kelahiran menurun tapi kenyataannya TFR atau angka kelahiran di Sumatera Barat semakin meningkat. Dikaitkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009, maka tingkat angka kelahiran tahun 2007 tersebut sangat mengkhawatirkan untuk mencapai sasaran RPJMN tahun 2009 yang telah ditentukan sebelumnya.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Sumatera Barat, kalau di bandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, TFR Sumatera Barat memperoleh peringkat ke enam terbanyak di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk serta harus semakin besar usaha yang diperlukan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan penduduk.

Seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Sumbar (Haluan, 17 Februari 2008) mengatakan:

"Total Fertality Rate (TFR) atau angka kelahiran merupakan salah satu Indikator keberhasilan suatu keluarga berencana (KB), di Sumatera Barat angka kelahiran cukup tinggi dan lebih banyak terjadi di kalangan orang miskin dan tidak mampu".

Selanjutnya, hal ini juga selaras dengan Posmetro Padang, 17 Januari 2008 menyatakan :

"Keluarga miskin merupakan penyumbang terbesar tingginya tingkat wanita subur melahirkan (Total Fertility rate/TFR di Sumatera Barat"

Selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2005, tanggal 25 Desember 2005 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Propinsi Sumatera Barat 2006-2010, telah memperkuat legitimasi pelaksanaan Program KB di Sumbar dengan menegaskan "Penyelenggaraan program KB Nasional merupakan bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dan bagian dari program pengentasan kemiskinan".

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumatera Barat tahun 2006, keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dapat dilihat dari pencapaian atau realisasi akseptor KB dari target yang ditetapkan dengan realisasinya tiap tahun. Dari 19 Kabupaten/Kota yang di Sumatera Barat yang merupakan Kabupaten yang mencapai target akseptor KB adalah Kabupaten Solok dan Tanah Datar.

Seperti yang diungkapkan Gusmal sebagai Bupati Kabupaten Solok dalam Singgalang, 30 Oktober 2008 menyatakan :

"Sekalipun secara persentase Kabupaten Solok selalu berhasil dalam program KB, khususnya dalam pencapaian akseptor baru, tetapi angka kelahiran juga meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Adanya kecenderungan kebanggaan mempunyai anak banyak. Masih ada yang berpikir banyak anak, banyak rezeki. Padahal di balik ini justru menggagalkan pembangunan"

Informasi yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2006, dari hasil proyeksi SUPAS (Survey Penduduk Antara Sensus) penduduk Kabupaten Solok berjumlah 347.288 jiwa, komposisinya terdiri dari 171.335 penduduk laki-laki, dan 175.953 jiwa penduduk perempuan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Menurut data tersebut Jumlah penduduk di Kabupaten Solok meningkat dibandingkan dengan tahun 2005.

Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di kabupaten Solok adalah Kecamatan Kubung dan di Kecamatan Kubung juga masih banyak terdapat keluarga miskin, sebagaimana yang tergambar dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Miskin di
Kabupaten Solok Tahun 2006

No	Jumlah Penduduk				Jumlah
	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keluarga Miskin
1	Pantai Cermin	8.773	9.759	18.532	612
2	Lembah Gumanti	22.337	24.248	46.585	5.390
3	Hilir Gumanti	8.817	7.665	16.482	1.161
4	Payung Sekaki	4.339	4.255	8.594	673
5	Tigo Lurah	4.392	4.551	8.943	1.041
6	Lembang Jawa	13.239	13.567	26.806	3.243
7	Danau Kembar	8.878	9.176	18.054	2.263
8	Gunung Talang	21.347	21.772	43.119	3.820
9	Bukit Sundi	11.293	11.446	22.739	1.804
10	IX Koto Sungai Lasi	5.076	5.292	10.368	817
11	Kubung	25.997	25.909	51.906	4.570
12	X Koto Diatas	8.828	9.490	18.318	2.074
13	X Koto Singkarak	15.043	15.813	30.856	2.808
14	Junjung Sirih	5.819	6.044	11.863	1.313
	Jumlah	164.178	168.987	333.165	31.960

Sumber: BPS 2006

Berdasarkan data diatas maka jumlah penduduk di Kabupaten Solok terdapat 333.165 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yakni Kecamatan Kubung, Selain itu di Kecamatan Kubung masih banyak jumlah keluarga yang tergolong miskin yakni sebanyak 4.570 keluarga.

Selanjutnya dapat dilihat dari data Statistik Kabupaten Solok tahun 2007 yakni adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Solok di bandingkan dengan dari tahun 2006, sebagaimana kita lihat pada tabel Sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Solok Tahun 2007

No	Jumlah Penduduk				
	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pantai Cermin	10.390	10.416	20.806	
2	Lembah Gumanti	24.280	24.517	48.797	
3	Hilir Gumanti	8.266	8.245	16.511	
4	Payung Sekaki	4.232	4.331	8.563	
5	Tigo Lurah	4.424	4.504	8.928	
6	Lembang Jawa	12.821	13.038	25.859	
7	Danau Kembar	9.386	10.293	19.679	
8	Gunung Talang	22.358	22.694	45.052	
9	Bukit Sundi	11.187	11.847	23.034	
10	IX Koto Sungai Lasi	5.197	5.239	10.436	
11	Kubung	27.284	27.551	54.835	
12	X Koto Diatas	10.636	11.091	21.727	
13	X Koto Singkarak	16.330	17300	33.630	
14	Junjung Sirih	6.628	7.032	13.660	
	Jumlah	173.419	178.095	351.514	

Sumber: BPS Kabupaten Solok Tahun 2007

Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk maka adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2007 dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006, berdasarkan tabel di atas maka terlihat bahwa Kecamatan Kubung mempunyai jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok

Kemudian Di Kecamatan Kubung juga mempunyai Pasangan usia subur dan wanita usia suburnya paling banyak di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana yang termasuk usia subur yaitu 15 – 49 tahun. Data

jumlah Pasangan usia Subur dan wanita usia subur di Kabupaten Solok tergambar dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 1.3 Data Pasangan Usia Subur dan Wanita Usia Subur di Kabupaten Solok Tahun 2006, 2007

No.	Nama Kecamatan	Pasangan Usia Subur Tahun 2006	Wanita Usia Subur Tahun 2006	Pasangan Usia Subur 2007	Wanita Usia Subur Tahun 2007
1	Pantai Cermin	3.231	4.704	3.279	4.711
2	Lembah Gumanti	8.222	12.696	8.581	12.129
3	Hilir Gumanti	2.834	4.092	2.829	4.110
4	Payung Sekaki	1.548	2.239	1.559	2.157
5	Tigo Lurah	1.751	2.315	1.806	2.323
6	Lembang Jawa	3.968	7.390	4.124	7.236
7	Danau Kembar	3.093	4.873	3.125	5.067
8	Gunung Talang	7.543	11.060	7.606	11.376
9	Bukit Sundi	3.655	6.007	3.711	5.328
10	IX Koto Sungai Lasi	1.623	2.702	1.639	2.675
11	Kubung	8.244	13.502	8.438	13.955
12	X Koto Diatas	2.940	4.421	2.950	4.665
13	X Koto Singkarak	4.597	8.259	4.774	8.118
14	Junjung Sirih	1.894	3.035	1.955	2.949
	Jumlah	55.143	87.295	56.376	86.799

Sumber: BKKBN tahun 2006

Dari data tersebut maka di Kecamatan Kubung mempunyai pasangan usia subur dan wanita usia subur yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk di Kecamatan Kubung masih terdapat 1.696 keluarga yang berada pada tingkat pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 2.874 keluarga (BPS Kabupaten Solok tahun 2006). Kemudian tahun 2007 terdapat 1.854 keluarga pra sejahtera dan 2.462 KS I. Menurut BKKBN yang tergolong keluarga miskin yaitu keluarga yang berada pada tingkat keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. jadi masih banyak keluarga yang berada pada tingkat prasejahtera dan keluarga

sejahtera I yang tergolong keluarga miskin di Kecamatan Kubung. Pada umumnya keluarga tersebut memiliki jumlah anak yang lebih dari dua orang. Sehingga akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kubung. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kelahiran di Kecamatan Kubung jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Solok, seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah Kelahiran di Kabupaten Solok Tahun 2005, 2006, 2007

No	Jumlah Kelahiran				
	Nama Kecamatan	2005	2006	2007	
1	Pantai Cermin	384	447	409	
2	Lembah Gumanti	787	1.066	1.073	
3	Hilir Gumanti	346	335	322	
4	Payung Sekaki	132	181	160	
5	Tigo Lurah	101	123	177	
6	Lembang Jawa	609	464	507	
7	Danau Kembar	381	379	359	
8	Gunung Talang	1.100	948	827	
9	Bukit Sundi	411	418	455	
10	IX Koto Sungai Lasi	172	187	182	
11	Kubung	1.234	1.147	1.113	
12	X Koto Diatas	347	345	317	
13	X Koto Singkarak	550	529	602	
14	Junjung Sirih	253	256	228	
	Jumlah	6.808	6.827	6.741	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2005, 2006, 2007

Dari data diatas dapat dilihat tingginya angka kelahiran di Kabupaten Solok di kabupaten Solok pada tiap tahunnya. Kecamatan yang memiliki jumlah kelahiran paling tinggi berada pada Kecamatan Kubung. Untuk itu perlu pengendalian tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB bagi keluarga miskin.

Dalam pelaksanaan program KB, peserta KB dapat digolongkan pada dua kelompok yaitu peserta KB Swasta dan Peserta KB Pemerintah. Bagi peserta KB pemerintah akan dibebaskan biaya sedangkan peserta KB swasta peserta KB menggunakan biaya sendiri atau sering disebut KB mandiri. Bila dilihat dari Hasil rekapitulasi pemutakhiran data keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tingkat nagari di Kecamatan Kubung tahun 2007 dan dihubungkan dengan keikutsertaannya pada program KB terdistribusi melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tingkat Nagari di Kecamatan Kubung Tahun 2007

		Status Keluarga Pra	Peserta KB		Bukan
No	Nama Nagari	sejahtera dan keluarga sejahtera	Pemerintah	Swasta	Peserta KB
1	Selayo	Pra Sejahtera	141 orang	-	133 orang
	•	Keluarga sejahtera I	171 orang	-	146 orang
2	Koto Baru	Pra Sejahtera	110 orang	59 orang	81 orang
		Keluarga sejahtera I	158 orang	289 orang	320 orang
3	Gaung	Pra Sejahtera	46 orang	9 orang	20 orang
		Keluarga sejahtera I	14 orang	5 orang	51 orang
4	Tanjuang Bingkuang	Pra Sejahtera	12 orang	65 orang	62 orang
		Keluarga sejahtera I	6 orang	9 orang	26 orang
5	Panyakalan	Pra Sejahtera	20 orang	12 orang	47 orang
		Keluarga sejahtera I	35 orang	18 orang	101 orang
6	Saok Laweh	Pra Sejahtera	34 orang	29 orang	52 orang
		Keluarga sejahtera I	28 orang	32 orang	136 orang
7	Gantuang Ciri	Pra Sejahtera	53 orang	22 orang	30 orang
		Keluarga sejahtera I	54 orang	17 orang	41 orang
8	Koto Hilalang	Pra Sejahtera	86 orang	-	75 orang
		Keluarga sejahtera I	55 orang	-	62 orang
	Jumlah	Pra Sejahtera	502 orang	196 orang	500 orang
Jumian		Keluarga sejahtera I	501 orang	370 orang	883 orang
Jumlah			1. 003 orang	566 orang	1.383 orang
Jum	lah Pasangan usia subur	dari keluarga miskin	2.952 orang		

Sumber: Data Kecamatan Kubung Tahun 2007

Dari data tersebut di Kecamatan Kubung terdapat 2.952 Pasangan Usia Subur (PUS) yang berasal dari keluarga pra sejahtera dan KS I, keluarga prasejahtera dan KS I yang menjadi peserta KB Pemerintah sebanyak 1.003 orang dan peserta KB Swasta sebanyak 566 orang, jadi peserta KB keseluruhan sebanyak 1.569 orang. Kemudian keluarga pra sejahtera dan KS I yang bukan peserta KB sebanyak 1.382 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Pasangan Usia Subur peserta KB lebih banyak di bandingkan dengan PUS bukan peserta KB, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan keluarga miskin yang mempunyai anak lebih dari dua orang.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh UPTKB Kecamatan Kubung dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana bagi masyarakat miskin antara lain melaksanakan pencatatan dan pelaporan keluarga yang tergolong Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, melaksanakan penyuluhan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan memberikan pelayanan gratis bagi keluarga miskin. Namun dalam kenyataannya masih banyaknya keluarga miskin yang mempunyai jumlah anak yang banyak. Dengan kenyataan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana (KB) Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok"

#### B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah adalah:

- a. Belum optimalnya Upaya pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- Masih Adanya Faktor-faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- c. Pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terhadap program KB?
- d. Adanya berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya angka kelahiran di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- e. Adanya dampak negatif yang timbul akibat Tingginya angka kelahiran terutama pada pasangan usia subur yang tergolong keluarga miskin

#### 2. Pembatasan Masalah

a. Upaya Pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

- Faktor-faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- c. Pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terhadap program KB

#### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
- c. Bagaimana Pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB di kecamatan Kubung Kabupaten Solok?

#### C. Fokus Penelitian

Agar penulisan ini lebih terfokus dan penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis, serta agar dapat mempertajam objek kajian pembahasan maka penulis membatasi pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Faktor-faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB di kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah

- Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin oleh Badan Keluarga Berencana di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penghambat pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- 3. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat masyarakat miskin terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB di Kecamatan Kubung kabupaten Solok?

#### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperkaya referensi Ilmu Sosial mengenai upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program bagi masyarakat miskin
- Supaya bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin.

## 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB bagi masyarakat miskin
- Sebagai masukan bagi masyarakat untuk melaksanakan program keluarga berencana

#### **BAB II**

#### **KAJIAN TEORITIS**

#### A. Pertumbuhan Penduduk

### 1. Konsep Pertumbuhan Penduduk

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera terdapat pada pasal 1 yang dimaksud dengan penduduk dan kependudukan dalam ayat (1), (2) adalah

- (1) "Penduduk" adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
- (2) "Kependudukan" adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.

"Perkembangan kependudukan" adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.

Ada beberapa teori penduduk yang dikemukakan oleh Ruslan Prawiro (1983: 27-32) adalah

#### 1) Teori Naturalistik

Teori naturalistik yang lebih terkenal di kemukakan oleh Raymond S. Pearl dengan daur kurva normalnya dan oleh Corrado Gini dengan metabolisma demografinya yaitu:

#### a) Teori Pearl

Pearl mengemukakan teori universal tentang pertumbuhan penduduk yaitu tiap penduduk mula-mula mengalami pertambahan atau kenaikan jumlah sangat lambat, yang makin lama makin cepat, mencapai titik daur dan kemudian makin berkurang pertambahannya sampai mencapai akhir pertumbuhan. Jadi mula-mula jumlah penduduk bertambah sampai semakin lama menjadi semakin banyak dan pada akhirnya akan bertambah lagi. Pada Malthus yang menyebabkan berhentinya pertambahan penduduk ialah makin banyaknya kematian yang diakibatkan kekurangan makan, kelaparan, penyakit dan lain-lainnya. Menurut Pearl pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kepadatan penduduk, maka perlu dikurangi angka kelahiran.

#### b) Teori Gini

Pertumbuhan penduduk oleh Gini dilihat dari sudut pandang statistik biologis dan ia percaya bahwa tendensi

reproduksi penduduk secara keseluruhan atau sebagai keluarga mengikuti kurva parabola matematik. Penduduk mengalami tingkat muda pada permulaan dengan pertumbuhan cepat, kemudian mencapai kedewasaan, menjadi tua dan menurun jumlahnya. Jadi setelah penduduk makin cepat pertambahannya maka persaingan dalam hidupnya semakin hebat.

#### 2) Teori Sosial

Seperti yang dikemukakan oleh Malthus dan lain-lainnya yang juga menekankan pada organisasi masyarakat penduduk, seperti yang dikemukakan oleh Godwin dan juga oleh Karl Marx. Teori itu tidak selalu dapat menerangkan gejala penduduk karena kebutuhan penduduk tidak hanya bersifat primer saja, bahan makan, melainkan juga hal-hal lain yang non-primer.

Menurut teori penduduk yang dikemukakan oleh Malthus dan Marx dalam Ruslan Prawiro (1983:33-34) mengatakan bahwa yang memegang peran pada pertumbuhan penduduk ialah faktor-faktor ekonomi. Kemudian ada pendapat yang lebih baru, yang disebut "Teori Penduduk Optimum" yang tidak lagi menekankan pada faktor ekonomi melainkan menekankan pada kehendak manusia. Di zaman yang maju ini kehendak manusia merupakan kekuatan yang sangat menentukan, sehingga dapat pula menentukan keseimbangan penduduk di dalam suatu wilayah tempat tinggalnya. Untuk menciptakan hasil minimun perkapita. Jumlah penduduk yang ideal ini disebut penduduk optimum, yang banyak

sedikitnya didalam wilayah atau negara tertentu tergantung dari kebudayaan yang sedang berlaku. Teori sosial tidak menekankan pada faktor ekonomi, melainkan lebih pada faktor kebudayaan.

Teori Malthus merupakan teori yang banyak digunakan dalam konsep kependudukan. Pendapat Malthus biasanya digolongkan ke dalam teori Sosial karena manusia memegang peran ialah peran manusia untuk mencukupi kebutuhan bahan makan.

Ada Beberapa sebab tingginya tingkat kelahiran di negara-negara berkembang menurut teori Malthus dalam Ruslan Prawiro (1983:35) ia mengajukan sebuah teori tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang masih dipercaya oleh banyak ahli sampai saat ini. Dalam sebuah bukunya berjudul Essay on the Principle of Population terbit tahun 1798, Thomas Malthus merumuskan sebuah konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang. Lebih lanjut Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat pada deret ukur atau tingkat geometrik (Pelipatan gandaan: 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya) setiap 30 atau 40 tahun, kecuali jika hal itu diredam oleh bencana kelaparan. Pada waktu bersamaan, karena ada proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmatik (1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka lahan yang dimiliki oleh keluarga makin lama akan semakin sempit.

Selanjutnya menurut Malthus dalam Ruslan Prawiro (1983:37) menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi masalah rendahnya taraf hidup yang Kronis atau kemiskinan absolut tersebut adalah "penanaman kesadaran moral di kalangan segenap penduduk dan kesediaan untuk membatasi jumlah kelahiran. Dengan perumusan konsep pentingnya pembatasan kelahiran dan jumlah penduduk, sehingga Malthus di pandang sebagai Bapak atau pelopor gerakan modern pengendalian kelahiran. Menurut Malthus yang harus dilakukan oleh manusia agar terhindar dari berbagai persoalan ekonomi, Dalam *Essays on the principle of population* (1796) Malthus menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari dari malapetaka tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk, atau keluarga berencana (KB) menurut istilah sekarang. Beberapa jalan keluar yang ia tawarkan adalah menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak.

Menurut Sudjarwos (2004:28) mengemukakan pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dan merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Dengan melihat kondisi bertambahnya atau tingginya pertumbuhan penduduk di suatu daerah akan berkaitan buruk kepada perekonomian suatu daerah apabila pertumbuhan penduduk tidak di ikuti dengan peningkatan penghasilan. Namun demikian di masa datang jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka akan berdampak pada turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti juga membutuhkan penyediaan pangan, perumahan, lahan untuk bekerja dan lapangan kerja.

Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi disebabkan tingkat kelahiran masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian penduduk. Hal ini mengakibatkan jumlah penduduk dengan usia muda yang besar, sehingga kelompok penduduk yang secara langsung ikut dalam proses produksi harus memikul beban yang relatif lebih berat untuk melayani kebutuhan penduduk yang belum termasuk dalam kelompok usia kerja. Makin besarnya jumlah penduduk usia muda mengakibatkan juga peningkatan kebutuhan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk menunjang kesejahteraan penduduk.

Memperhatikan sejarah bangsa-bangsa di dunia dapat dilihat bahwa keberadaan sebagai kelompok manusia yang menduduki permukaan bumi selalu mengalami perubahan-perubahan. Ada juga teori yang menerangkan bahwa perubahan-perubahan jumlah penduduk terjadi karena faktor alam atau lebih dikenal dengan teori Naturalistik. Selain itu ada juga teori lain yang didasarkan atas faktor sosial dan kebudayaan karena manusia merupakan faktor yang lebih mempunyai peran.

Banyak teori yang mengupas penduduk, ada yang saling menguatkan dan ada yang saling bertentangan. Dari teori-teori yang ada teori Malthus yang paling terkenal karena Malthus yang pertama kali mengeluarkan teori penduduk secara ilmiah, pendapat Malthus

merangsang munculnya konsepsi-konsepsi baru tentang kependudukan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Tjiptoherijanto (1999:36) bahwa Pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan maka diperlukan adanya tolak ukur kependudukan yang mencakup berbagai aspek yakni: a) Kependudukan, b) Sumber daya manusia, c) Ekonomi, d) Sosial budaya, e) Pendidikan dan lain-lainnya.

Hal tersebut dapat berfungsi sebagai alat pemantau pembangunan ekonomi dan sebagai dasar kebijakan intervensi terhadap sektor-sektor pembangunan yang dapat mengganggu keharmonisan dan keseimbangan penduduk dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sosial dan ekonomi antara lain karena meningkatnya pemakaian kontrasepsi berkat adanya gejolak keluarga berencana dan meningkatnya tingkat pendidikan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang harus ditingkatkan. Perkembangan kependudukan Indonesia di ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia.

# 2. Faktor Penyebab Pertumbuhan Penduduk

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk atau Faktor penyebab pertumbuhan penduduk dikemukakan oleh Sutama (http://elcom.umy.ac.id) yaitu

#### 1) Kelahiran (natalitas)

Faktor-faktor penunjang kelahiran (Pro natalitas) antara lain:

- a. Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan malu
- Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua.
- c. Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.
- d. Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua.
- e. Anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki, sehingga bila belum ada anak laki-laki, orang akan ingin mempunyai anak lagi.

#### 2) Kematian (Mortalitas)

Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (promortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas).

a) Faktor pendukung kematian (pro mortalitas)

Faktor ini mengakibatkan jumlah kematian semakin besar yang termasuk faktor ini adalah:

- Sarana kesehatan yang kurang memadai.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- Terjadinya berbagai bencana alam
- Terjadinya peperangan
- Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri

- Tindakan bunuh diri dan pembunuhan.

#### b) Faktor penghambat kematian (anti mortalitas)

Faktor ini dapat mengakibatkan tingkat kematian rendah. Yang termasuk faktor ini adalah:

- Lingkungan hidup sehat.
- Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap.
- Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain.
- Tingkat kesehatan masyarakat tinggi.
- Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk.

#### 3) Migrasi atau Perpindahan Penduduk

Migrasi ada dua yaitu migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk (imigrasi), dan yang dapat mengurangi penduduk disebut migrasi keluar (emigrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami.

Sadono Sukirno (1985:175-176) berpendapat bahwa perkembangan penduduk dunia yang besar disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak dewasa ini, sejak permulaan abad ini hingga sekarang yaitu dalam waktu tiga perempat abad, penduduk dunia telah berkembang dari 1,6 milyar menjadi 4 milyar. Peledakan perkembangan penduduk yaitu perkembangan penduduk yang berlebihan b. Tingkat pertambahan penduduk yang relatif yang laju dalam beberapa dasawarsa belakangan ini. Bahwa pada masa ini laju tingkat pertambahan penduduk adalah lebih besar dari pada masa sebelumnya.

Perkembangan penduduk tahun 1900-1930 kurang lebih dua per tiga penduduk dunia berada pada negara berkembang. Pada tahun 1930 penduduk negara berkembang sebesar 63,5 persen.

Faktor-faktor yang menimbulkan tingkat perkembangan penduduk yang cepat. Berdasarkan kepada tingkat perkembangan di negara-negara berkembang, Bairoch dalam Sadono Sukirno (1985:179-180) membedakan corak perkembangan penduduk berkembang menjadi 3 fase :

- a. Diantara tahun 1900 sampai 1920, fase ini tingkat perkembangan penduduk sangat lambat. Pada fase ini penduduk tidak selalu berkembang karena disebabkan bahaya kelaparan atau wabah penyakit. Dalam fase ini terdapat tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi sehingga kedua faktor tersebut menyebabkan tingkat pertambahan penduduk yang rendah.
- b. Dari akhir fase pertama sampai tahun 1950, fase ini ditandai oleh berlakunya penurunan tingkat kematian, akan tetapi tingkat kelahiran tidak mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kematian pada fase ini adalah bidang kedokteran yang sudah berkembang.
- c. Sesudah perang dunia kedua, pada fase tingkat kematian mengalami penurunan sedangkan tingkat kelahiran tidak mengalami penurunan

bahkan terjadi peningkatan kelahiran. Setelah perang dunia kedua perkembangan penduduk di negara berkembang mengalami perkembangan yang sangat tinggi yakni sebesar 2,1 persen diantara tahun 1950-1960 dan sebesar 2,4 persen diantara tahun 1960-1970.

Berdasarkan pada ketiga fase perkembangan penduduk dapat disimpulkan perkembangan penduduk yang sangat pesat di negara berkembang disebabkan oleh berlakunya proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan penduduk yakni besarnya angka kelahiran dan angka kematian.

#### 3. Akibat Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan penduduk yang bertambah cepat dalam jumlah yang sangat besar, dalam beberapa dasawarsa ini menimbulkan beberapa masalah baru yang sangat serius di negara berkembang dikemukakan oleh Sadono Sukirno (1985:186) diantaranya:

- a. Masalah struktur penduduk yang berat sebelah kepada penduduk dibawah umur (dibawah 15 tahun).
- b. Masalah pengangguran yang dihadapi bertambah serius.
- c. Proses urbanisasi dari daerah-daerah pedesaan menuju perkotaan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno (1985:202-204)
Perkembangan penduduk akan mempunyai dampak negatif apabila
penduduk tersebut mempunyai sumber daya manusia yang tidak
berkualitas, sehingga lapangan pekerjaan akan menjadi sulit. Pada

umumnya hal ini banyak ditemui di negara-negara berkembang.

Perkembangan penduduk pesat dengan sumber daya manusia yang rendah maka akan menyebabkan penduduk berada pada tingkat kemiskinan.

Selaras dengan yang dikatakan menurut Nelson dalam Sadono Sukirno, (1985:204) menyatakan bahwa pertambahan penduduk yang pesat di negara-negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin menurun.

Selanjutnya Tjiptoherijanto dalam Noli (2007:23) mengatakan Ada beberapa konsekwensi negatif akan timbul akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, konsekwensi negatif tersebut adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi menurun terutama pada negara yang kondisi dasarnya masih miskin dan tergantung pada sektor pertanian
- b. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang makin memburuk,
- c. Memperkecil kemungkinan pemerataan untuk menikmati pendidikan,
- d. Memperburuk tingkat kesehatan,
- e. Keterbatasan bahan pangan yang memadai akan menjadi sulit,
- f. Terjadinya kerusakan lingkungan

Kemudian dalam Mudrajad Kuncoro (2006:216-2170 ada dua pandangan para ahli tentang dampak pesatnya pertumbuhan penduduk yaitu:

a. Menurut pendapat Ehrich yang mempunyai pandangan pesimis yakni mengatakan bahwa penduduk (Pertumbuhan penduduk yang pesat)

dapat mengantarkan dan mendorong terjadinya pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kelaparan

b. Menurut Thomas yang Pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah asset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu gejala dari dinamika penduduk. Menurunnya tingkat kematian sebagai akibat kemajuan kedokteran, bersamaan dengan tingkat kelahiran yang masih tetap tinggi, sehingga mengakibatkan tingkat pertambahan penduduk melonjak tinggi atau *population explosion*. Sans S. Hutabarat (1981:10-11) menyatakan bahwa Ledakan penduduk ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan mempunyai akibat yang buruk, antara lain:

- a. Menurunnya mutu kehidupan manusia
  - Masalah pengangguran, karena penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan bertambahnya tenaga kerja
  - Pengangguran akan menimbulkan, akibat lain, yaitu bertambahnya kriminalitas dalam segala bentuknya
  - 3) Masalah perumahan juga menjadi masalah besar, sebab pertumbuhan penduduk akan menuntut penyediaan perumahan. Perumahan yang tidak mencukupi kebutuhan dan tidak memenuhi

syarat akan menimbulkan banyak tuna wisma dan menurunnya taraf kesehatan.

# b. Berkembangnya sikap yang bersifat positif

Banyak orang yang tidak berhasil mengatasi tantangan hidup, mereka ini bisa mempunyai sikap apatis dan lesu atau sikap yang pendirian hidup asal hidup, tidak perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup. Disamping itu masih ada kemungkinan, orang cenderung lari pada cara-cara berfikir irasional.

Selanjut Sans S. Hutabarat (1981:50) juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial yang antara lain dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan mempunyai pengaruh timbal balik dengan kehidupan sosial dan sangat vital, artinya pertambahan penduduk akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan kehidupan sosial akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk
- Masalah kependudukan pada umumnya mulai mendapat perhatian yang luas setelah terjadi krisis pangan di negara-negara berkembang
- c. pertumbuhan penduduk yang cepat itu membawa konsekwensi kebutuhan dalam pertambahan produksi pangan, lapangan kerja, pelayanan kesehatan, pemungkinan dan sarana-sarana pendidikan
- d. di negara berkembang terjadi perbedaan yang besar antara pertumbuhan penduduk dan tersedianya kebutuhan hidup fasilitas kehidupan serta lapangan kerja yang dibutuhkan

e. Kemiskinan, kebodohan, taraf hidup yang rendah mudah menimbulkan sikap masa bodoh, menggantungkan nasib pada takdir dan percaya pada tahayul

# 4. Pertumbuhan Penduduk di Tengah Kemiskinan

## a. Konsep Kemiskinan

Masalah yang dominan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah kemiskinan. Konsep dan definisi kemiskinan merupakan titik tolak pembahasan yang penting, karena konsep kemiskinan melatarbelakangi pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pilihan indikator-indikator untuk memantau kondisi kemiskinan.

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Seorang ekonom akan mendefinisikan kemiskinan secara berbeda dengan ilmuwan lain. Definisi seorang marxian akan berbeda dengan seorang weberian. Inilah fakta yang harus disadari sejak awal, bahwa definisi dari seorang teoretis mengandung paradigma atau ideologi tertentu sehingga tak ada kesempurnaan sejati, baik dalam hal konsep, pendekatan maupun modelnya.

Ada beberapa defenisi kemiskinan yang dikemukankan oleh para ahli (<a href="http://www.gapri.org/tfiles/file">http://www.gapri.org/tfiles/file</a>) yaitu

1) Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang

menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

2) John Friedman (1979:101) mendefenisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial danm politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.

Melihat dari pendapatan relatif yang di terima masing-masing kelompok di dalam suatu masyarakat kepada persoalan yang lebih penting yaitu mengenai kadar atau jangkauan kemiskinan absolut (absolute poverty) di negara-negara berkembang. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah kemiskinan Internasional. Kemiskinan Absolut dapat di ukur dengan angka atau hitungan perkepala.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2006:120) mengatakan bahwa penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi adalah

- Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan
- 3) Kemiskinan muncul karena akibat akses dalam modal.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 1994) mengembangkan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan mempergunakan indikator ekonomi, kesehatan, gizi dan sosial. Sementara itu menurut BKKBN bahwa keluarga yang tergolong keluarga miskin yakni keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kemudian keluarga sejahtera dapat di klasifikasikan menurut BKKBN tahun 2007, yang tergolong keluarga miskin menurut BKKBN adalah Keluarga yang tergolong kepada Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, dengan indikator sebagai berikut:

# 1) Keluarga Prasejahtera

Adalah keluarga yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I

# 2) Keluarga Sejahtera I

Kriteria keluarga sejahtera I adalah sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
- b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sekali atau lebih
- Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian
- d) Bagian yang terluas dari lantai rumah dari tanah
- e) Bila anak sakit di bawa ke sarana atau petugas kesehatan atau pengobatan modern

# 3) Keluarga Sejahtera II

Bisa dikatakan keluarga sejahtera II, apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera II, yaitu

 a) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk

- b) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir
- c) Luas lantai tanah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah
- d) Seluruh anggota keluarga yang berumur di bawah 60 tahun dewasa ini bisa membaca tulisan Latin
- e) Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini
- f) Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai pekerjaan tetap
- g) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- h) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.

#### 4) Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang memenuhi syarat-syarat keluarga sejahtera I, II, III dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anak hidup paling banyak dua orang atau lebih dari dua orang keluarga masih PUS memakai kontrasepsi saat ini
- b) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- c) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal

- d) Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- e) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/ majalah
- f) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat
- g) Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama

# 5) Keluarga Sejahtera III Plus

Apabila keluarga memenuhi syarat keluarga sejahtera I, II, III dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat lainnya.

Menurut Michael P. Todaro (2004:230) Ada beberapa penggolongan kemiskinan, yang sering terjadi sebagai pedoman untuk memahami substansi kemiskinan. Adapun penggolongan kemiskinan tersebut didasarkan suatu standar tertentu.

#### 1) Kemiskinan Absolut

kemiskinan ini di kaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya di batasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan

seseorang untuk hidup layak. Bila tingkat pendapatan tidak dapat mencapai tingkat kebutuhan minimum maka orang atau keluarga tersebut di katakan miskin. Dengan demikian , kemiskinan di ukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat kebutuhan dasarnya.

#### 2) Kemiskinan relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti "tidak miskin", walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah di bandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang/lingkungan yang bersangkutan

#### 3) Kemiskinan Natural

kemiskinan natural hampir sama pengertiannya dengan kemiskinan turun temurun, kemiskinan ini disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi oleh semua komunitas, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Pada umumnya keterbatasan tersebut merupakan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang buruk, sehingga tidak dapat menyediakan fasilitas bagi komunitas disekitarnya untuk

mengusahakan aktivitas produksi untuk memperoleh pendapatan ekonomi yang layak.

#### 4) Kemiskinan kultural

Suatu kondisi miskin yang dihadapi oleh suatu komunitas, yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan suatu proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa kriteria Indikator Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2007 yakni:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 perorangan
- 2) Jenis lantai bangunan terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
- 5) Sumber rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air yang tidak terlindungi, sungai dan air hujan
- Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun

- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- perbulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD
- 14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah di jual minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor baik kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Berdasarkan Biro pelaporan dan statistik BKKBN tahun 2007, memberikan pengertian mengenai Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu dari Indikator meliputi :

- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah,
   bekerja atau sekolah dan bepergian
- 3) Bagian lantai yang terluas dari tanah.

Selanjutnya definisi keluarga miskin adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu/ lebih Indikator yang meliputi:

- 1) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru

#### 3) Luas tanah rumah paling kurang 8 M2

Berdasarkan pengertian di atas maka Indikator penentu kemiskinan adalah indikator yang ada pada tahapan Prasejahtera alasan ekonomi dan KS I alasan ekonomi yang dapat menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kualitas pangan, sandang, dan tempat tinggal/ papan.

# b. Akibat Pertumbuhan Penduduk di Tengah Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk selalu mengalami perubahan, kadang kala terjadi penurunan jumlah penduduk dan kadang kala terjadi peningkatan jumlah penduduk. Salah satu penyebab utama terjadinya perubahan kependudukan secara mendadak selama perjalanan sejarah baik naik maupun turun, dipengaruhi oleh berbagai masalah yang menimbulkan hilangnya nyawa serta lonjakan kematian manusia yang disebabkan bencana alam, peperangan, kelaparan dan lain sebagainya. Sementara itu pertumbuhan begitu pesat dewasa ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran. Apalagi bagi sejumlah negara yang belum

lama melaksanakan upaya-upaya pengendalian kelahiran atau program keluarga berencana.

Perbedaan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara maju dan negara berkembang semata-mata atas dasar kenyataan bahwa tingkat kelahiran (fertilitas) di berbagai negara berkembang umumnya jauh lebih tinggi daripada negara maju. Karena penyebab utama perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara negara maju dan negara berkembang bertumpu pada perbedaan tingkat kelahiran. Selanjutnya laju pertumbuhan penduduk pada umumnya lebih banyak terdapat pada keluarga miskin, karena bagi keluarga miskin anak di pandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu hasil, baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sebagai sumber finansial orang tua di usia lanjut. Dalam sebuah studi empiris yang sangat teliti, Profesor, Kuznets dalam Todaro (2004:376) mencatat bahwa penduduk di negara-negara berkembang adalah

"Mudah sekali beranak pinak karena kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang ada di sekitar mereka membuat sebagian besar dari mereka memandang setiap tambahan anak, baik dari sudut kepentingan sosial maupun ekonomi, sebagai tambahan tenaga kerja Cuma-Cuma bagi keluarga, sebagai suatu perjudian genetik (*genetic lottery*), maupun sebagai jaminan sosial ekonomi di hari tua guna bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat yang minim perlindungan sosial dan cenderung diatur hanya oleh mereka yang berada"

Sehingga dengan jumlah anak yang banyak tanpa mempunyai pendidikan yang cukup, atau tidak mempunyai kualitas nantinya akan

mempengaruhi pembangunan karena pertumbuhan penduduk sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan, terutama pembangunan di daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat mendasar yaitu besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Selanjutnya Frank W. Notestein dalam Amrah Muslimin (1986: 16) menerangkan bahwa "Sistem kelahiran yang tak ada hentinya di dunia sekarang ini merupakan pemborosan jiwa yang sangat "berdosa". Sebabnya kebanyakan daripada manusia cilik yang baru saja membuka mata di dunia ini, hanya dilahirkan untuk hidup dalam keadaan sengsara dan penuh kesukaran dan kemiskinan. Kebanyakan antara bayi-bayi ini mati dalam usia muda dan jikalau tidak menjadi besar dalam keadaan kemiskinan dan menderita berbagai-bagai penyakit, yang merupakan halangan-halangan baginya untuk mengecap kehidupan yang asli".

Ini berarti anak yang dilahirkan dari keluarga miskin maka secara tidak langsung akan menambah orang miskin. Ini di disebabkan mereka yang terlahir tersebut secara otomatis akan langsung menjadi orang miskin. Jadi tergambarlah apabila keluarga yang miskin

mempunyai anak yang banyak maka mereka menambah penderitaan, dan serba keterbatasan. Bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya maka akan terjadi perubahan-perubahan baik dari segi kebutuhan produksi pangan maupun kebutuhan lainnya.

Pesatnya pertumbuhan penduduk maka akan menimbulkan berbagai konsekwensi negatif, untuk menghindari konsekwensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat maka diperlukan melaksanakan program KB, dewasa ini program Keluarga Berencana lebih diarahkan pada Pasangan Usia Subur (PUS) terutama untuk masyarakat miskin karena ini merupakan tujuan utama Program Keluarga Berencana.

Kemudian Tjiptoherijanto (1999:23-24) mengemukakan bahwa kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran sebagai berikut

# 1) Kependudukan

Dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan penduduk adalah subjek dan objek pembangunan, sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus di bina dan di kembangkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti lebih luas.

- 2) Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika di ikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika di ikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, akan menjadi penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Itu sebabnya setiap upaya pengendalian penduduk harus sekaligus dilakukan bersamaan dengan usaha peningkatan kualitas manusia.
- 3) Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka waktu yang panjang karena dampaknya baru terasa dalam waktu yang panjang, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan diabaikan.

Berdasarkan isu strategis yang terkait dengan kependudukan maka dampak perubahan pembangunan jangka panjang seperti contoh hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 35 tahun yang lalu tahun 1968, baru akan dinikmati hasilnya beberapa tahun kemudian. Melihat dampak kependudukan yang bersifat jangka panjang maka persoalan kependudukan dan pembangunan nasional tersebut harus ditangani dengan cermat dan sungguh-sungguh karena kesalahan yang terjadi akan berdampak buruk pada generasi mendatang dan bahkan berdampak pada kehancuran bangsa.

Penduduk pada dasarnya merupakan target utama yang dituju oleh setiap proses pembangunan yaitu berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tjiptoherijanto (1999:27) menyatakan butirbutir indikator kependudukan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kependudukan sangat banyak dan beragam, indikator tersebut bisa berupa aspek pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan serta lain-lainnya.

Pembangunan kependudukan dan lingkungan kecil merupakan salah satu strategi pokok pembangunan daerah kabupaten Solok tahun 2006-2010, pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, hal tersebut diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan perlu juga dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk.

# B. Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,

pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sehingga dengan program KB diharapkan dapat dicapai keluarga kecil bahagia. Keluarga kecil bahagia akan membawa bangsa menuju bangsa yang sejahtera.

Selaras dengan pengertian keluarga berencana menurut peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1994 pasal (12), (13) adalah

- a. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
- b. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.

Selanjutnya menurut Deddi Supriady Bratakusumah (2005:149-150) menyatakan bahwa pengendalian penduduk biasanya di fokuskan pada masalah kelahiran, tanpa harus mengabaikan masalah kesehatan dan kematian. Pengendalian angka kelahiran lazim dilaksanakan berdasarkan dua hal yaitu a) Pembatasan jumlah kelahiran anak, b) Pengaturan jarak kelahiran

Menurut Jhigan, ML (2004:438) menyatakan bahwa keluarga berencana harus dilaksanakan tidak hanya sebagai program pembangunan utama tetapi sebagai suatu gerakan nasional yang mencerminkan sikap dasar menuju kehidupan yang lebih baik bagi individu, keluarga dan masyarakat.

Jhigan, ML (2004:434) menyatakan bahwa Program keluarga berencana harus menyangkut:

- a. Pendidikan masyarakat mengenai keluarga berencana, yang harus mencakup pendidikan sek, nasihat perkawinan, dan bimbingan anak-anak.
   Media untuk ini dapat berupa organisasi sosial, film, radio dan media cetak
- b. Pelayanan keluarga berencana, harus diselenggarakan dalam skala besar. Pelayanan keluarga berencana dapat diintegrasikan dengan pelayanan media dan kesehatan biasa, klinik keluarga berencana dibuka di wilayah pedesaan, industri dan pemukiman lainnya harus ada unit-unit mobil untuk mengajar khalayak ramai mengenai keluarga berencana. Bantuan organisasi sukarela juga dapat diterima. Pusat-pusat keluarga berencana harus memberikan alat kontrasepsi atau bahkan melakukan vasektomi gratis, kesemuanya dapat disubsidi pemerintah.
- c. Pendidikan dan pemeliharaan jaringan luas pusat-pusat latihan para petugas.
- d. Program penelitian yang luas dalam masalah biologi, kedokteran dan kependudukan
- e. Alat kontrasepsi harus dibuat dalam negeri sehingga penyediaannya tidak akan terhambat alat-alat demikian harus sederhana, murah dan aman.
- f. Pemberian biaya bagi pencegahan kelahiran di negara yang terbelakang.

  Menurut Dr. Stephen Enke, ia menyarankan untuk mengurangi angka kelahiran yakni dengan cara pemerintah harus memberikan bonus pada

istri yang tidak hamil, pemerintah harus memberikan bonus bagi suami dengan persetujuan istri menyerahkan diri untuk divasektomi Cuma-Cuma. Di negara terbelakang dimana rakyat miskin, sistem bonus dapat menjadi rangsangan yang baik bagi khalayak ramai.

Perkembangan program KB Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Luar Jawa Bali (LJB) pengembangan I, dan pelaksanaan Program KB Nasional secara resmi baru dimulai tanggal 1 April 1974 atau tahun I Pelita II.

Diakhiri Pelita II, Program KB Nasional dikembangkan lagi ke 11 propinsi lainnya (LJB. II) yakni: Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu. NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengara, Sulawesi Tengah, Timtim, Maluku dan Irian Jaya.

Kemudian di lihat dalam Perkembangan Kebijakan Program KB Nasional pada awal tahun 1970 Program KB Nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Namun kemudian, tujuannya lebih ditekankan pada aspek ekonomi untuk menaikkan tingkat kesejahteraan keluarga dengan cara pengendalian kelahiran dengan slogan Norma keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera (NKKBS), sehingga tingkat pertumbuhan penduduk tidak melebihi produksi pangan. Dua puluh tahun kemudian kebijaksanaan kependudukan tidak hanya ditujukan pada penurunan tingkat fertilitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Paradigma Baru Program KB Nasional ,Program KB di Indonesia sebelum dan sesudah Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD Kairo 1994) mengalami perubahan secara nyata, pada kurun 70-an sampai 90-an awal, pelayanan KB sangat menekankan pada aspek demografi yaitu pengendalian angka kelahiran. Pada ICPD 1994 kebijakan pelayanan KB lebih mengedepankan aspek hak azasi manusia (HAM) dalam arus pembangunan sesuai dengan perkembangan pembangunan lainnya ditingkat global dan nasional.

Perkembangan Program KB dan KR ke depan perlu mengikuti arus perubahan seperti yang diharapkan ICPD 1994 tersebut, yang secara kongkrit telah membawa perubahan paradigma yang semula orientasinya bernuansa demografi ke nuansa kesehatan reproduksi.

Untuk melakukan percepatan program guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2006-2010. Pelaksanaan Program KB Nasional di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2005, tanggal 25 Desember 2005 yang dikukuhkan dengan Perda No. 4 tahun 2007, tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2006-2010, dengan kegiatan pokok:

- a. Melakukan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi) secara berkesinambungan untuk melembagakan kelestarian program KB.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi keluarga miskin.
- c. Pemberdayaan penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lini Lapangan.
- d. Memantapkan Mekanisme Operasional Program KB Nasional.
- e. Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

## f. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas

Program KB Nasional merupakan program Sosial dasar yang sangat penting artinya dalam pembangunan Nasional, terutama bagi kemajuan suatu Bangsa. Bangsa yang bisa dikatakan maju adalah bangsa yang masyarakatnya sejahtera. selanjutnya Pertumbuhan ekonomi tidak akan memberi makna yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat bilamana tidak diikuti dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2009 dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, yang memberi legitimasi yang kuat bagi peranan dan keberlangsungan Program KB Nasional. Karena program KB sangat mempunyai peran penting dalam mengendalikan jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk selalu bertambah sedangkan kebutuhan dasar tidak bertambah maka akan mengakibatkan terjadinya kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pokok. Untuk itu diperlukan usaha untuk pengendalian jumlah penduduk.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga kecil yang sejahtera, bahagia dan mandiri adalah melalui pelaksanaan keluarga berencana, seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 10 tahun 1992, bahwa keluarga berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Peranan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat baik wanita maupun pria, terutama generasi muda, perlu

ditingkatkan dan lebih diperluas agar makin disadari mendesaknya masalah kependudukan serta pentingnya keluarga kecil sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sosial dan ekonomi salah satu faktor pendukungnya adalah pemakaian kontrosepsi berkat adanya gerakan keluarga berencana dan meningkatkan pendidikan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang harus ditingkatkan. Perkembangan penduduk di Indonesia di ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar nomor empat setelah Cina, India, Amerika Serikat. Untuk itu perlu dilakukan usaha pengendalian penduduk

Faktor tersebut menjadi salah satu dasar dari kebijakan program KB yang lebih memfokuskan pelayanan KB kepada keluarga miskin. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin akan pelayanan KB, adalah dengan cara memperluas akses pelayanan baik melalui jaringan pelayanan yang dipunyai pemerintah, maupun jaringan pelayanan swasta.

Pelaksanaan program KB di Era Reformasi masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah ditegaskan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pengembangan kualitas keluarga kecil melalui Program KB Nasional dalam rangka membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Menurut Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, Program KB Nasional diarahkan untuk "meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka

kematian, dan meningkatkan kualitas Program Keluarga Berencana". Untuk itu upaya pengendalian kelahiran dan pelaksanaan Program KB Nasional yang berkualitas merupakan salah satu program pokok dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya.

Selanjutnya Program KB Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

Selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1998 tentang pengeluaran pembangunan keluarga sejahtera yang mencakup juga tentang KB dimana dinyatakan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasan usia perkawianan, pembinaan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB mempunyai tujuan ganda yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk dan melembagakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dalam masayarakat Indonesia.

# C. Faktor Penghambat Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Sadono Sukirno (1985:175)Ada beberapa masalah atau penghambat usaha pengendalian perkembangan penduduk yaitu:

- 1. Masalah ekonomi
- 2. Masalah Sosial-Budaya

## 3. Masalah Keagamaan

#### 4. Masalah Politik dan Psikologis

Keempat faktor tersebut diatas merupakan faktor penghambat dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, karena faktor tersebut menimbulkan kesulitan untuk mengurangi perkembangan penduduk terutama terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia.

Penghambat usaha pengendalian pertumbuhan penduduk dari masalah ekonomi, status ekonomi yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih tinggi mendorong orang untuk sedikit mempunyai anak, sedangkan penduduk yang berada pada status ekonomi yang rendah atau miskin cendrung memiliki jumlah anak yang banyak. Untuk itu perkembangan ekonomi juga memungkinkan tingkat pendidikan dipertinggi. Pendidikan yang tinggi akan memberikan pengaruh penting dalam pengurangan jumlah anak, karena adanya penilaian dengan memiliki sedikit anak maka beban tanggungan juga akan sedikit. Sedangkan penduduk miskin cendrung memiliki pendidikan yang rendah sehingga penilian dengan memiliki anak yang banyak merupakan aset masa depan dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari segi sosial budaya, pertumbuhan penduduk yang cepat, dimungkinkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, adanya pertumbuhan penduduk dalam masyarakat agraris, mempunyai nilai tersendiri. Karena adanya kecendrungan teknologi yang sederhana untuk digantikan dengan tenaga manusia, ini berarti menerima pertambahan jumlah penduduk, yang

berarti tersedianya tenaga kerja. Lambat laun kebutuhan itu akan menjadi kebutuhan dan pada akhirnya akan menjadi adat istiadat yang melembaga. Rasionalnya bermacam-macam, mempunyai anak sebagai pelanjut keturunan, anak sebagai pewaris nama, anak sebagai ikatan perkawinan, jaminan hari tua, menambah banyak rezeki. Demikian penting kehadiran anak dalam perkawinan, sehingga banyak perkawinan yang kandas hanya karena tidak mempunyai keturunan.

Selanjutnya ditinjau dari masalah agama yakni adanya ajaran agama yang melarang pelaksanaan pembatasan kelahiran seperti agama Islam, agama Katolik Roma dan lain-lainnya. Sehingga hal yang demikian akan mempersulit untuk melaksanakan pengendalian jumlah penduduk sehingga pertumbuhan penduduk akan semakin pesat. Menurut pandangan agama Islam bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah maka akan di berikan rezki sehingga pembatasan angka kelahiran Cuma dalih-dalih dalam mengkambing hitamkan negara-negara sedang berkembang. Pandangan Islam Gaya hidup yang boros dari Negara-negara maju maupun pola konsumsi yang mereka lakukan adalah penyebab yang sebenarnya atas meningkatnya pemakaian sumber-sumber daya dunia. Lagi pula, konsumsi Negara-negara Barat telah menjadikan Dunia Ketiga terus berada dalam keadaan miskin. Pada saat yang sama, meningkatnya jumlah penduduk di Dunia Ketiga dipersalahkan sebagai penyebab kesengsaraan di dunia. Pertumbuhan penduduk dikambinghitamkan sebagai penyebab kemiskinan sedangkan didasarkan pada Surat Al-Imran: 37 "Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya..."

Kemudian dalam Surat Al-Maidah:88 mengatakan bahwa "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu". Sehingga pengendalian jumlah penduduk tidaklah sesuai dengan pandangan agama Islam.

Kemudian dilihat dari segi politik dan psikologi, seperti mencegah campur tangan langsung WHO dalam hal mengendalikan penduduk lebih dua dasawarsa setelah badan ini dibentuk. Di lihat dari jumlah penduduk di Barat menurun secara relatif dibandingkan dengan bagian dunia lain, sedangkan pada dunia ketiga mempunyai pertumbuhan penduduk yang tinggi maka negara-negara ketiga punya alasan yang sah dikarenakan jumlah penduduknya punya pengaruh lebih besar pada lembaga-lembaga internasional dan perwakilannya di badan-badan internasional. Adanya anggapan pada negaranegara ketiga Isu over populasi adalah alat yang sangat berguna untuk menjelek-jelekkan Negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang besar dan pada saat yang sama mengurangi resiko berkurangnya pengaruh Negaranegara maju di masa datang. Hal ini terlihat ketika Turki bergabung dengan Uni Eropa, setelah bergabung dengan Uni Eropa itu, maka penduduk Turki yang hampir 70 juta jiwa itu akan memberikannya hak untuk menempatkan jumlah perwakilan kedua terbesar pada Parlemen Eropa. Terlebih lagi, proyeksi demografi menunjukkan bahwa jumlah penduduk akan melebihi jumlah Jerman menjelang tahun 2020. Keanggotaan Turki akan memiliki banyak konsekuensi pada arah Uni Eropa di masa datang termasuk pada isu

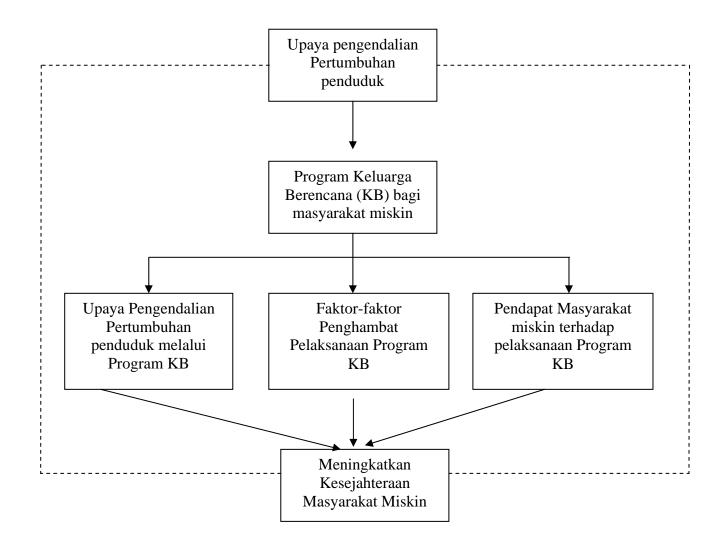
rencana pemekarannya di masa datang. Semua kesalahan ditimpakan pada Dunia Ketiga yakni pada masalah besarnya jumlah penduduk.

# D. Kerangka Berpikir (Konseptual)

Adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan menimbulkan permasalahan baik permasalahan mengenai perekonomian bangsa juga akan berpengaruh pada pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk salah satunya melalui Program Keluarga Berencana. Pada umumnya di negara berkembang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga memiliki tingkat perekonomian yang rendah, sehingga masalah kependudukan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan yang banyak melanda masyarakat. Hal tersebut disebabkan tinggi jumlah anak yang dilahirkan oleh pasangan subur terutama berasal dari masyarakat miskin yang hidup di pedesaan.

Untuk itu diperlukan usaha pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana. Di jelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2005, tanggal 25 Desember 2005 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) Propinsi Sumatera Barat 2006-2010, telah memperkuat legitimasi pelaksanaan Program KB di Sumbar, dengan menegaskan: "Penyelenggaraan program KB Nasional merupakan bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dan bagian dari program pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan upaya pengendalian pertumbuhan melalui program KB maka ditemui beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program KB, selain itu juga di minta pendapat masyarakat miskin mengenai pelaksanaan program KB. Dalam pelaksanaan Program KB ditemukan hambatan-hambatan, dari hambatan yang ada tersebut perlu di perbaikan demi terlaksananya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan baik untuk ke depannya. Adanya perbaikan-perbaikan terdapat hambatan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin



Gambar Kerangka Konseptual

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Upaya yang dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk yakni pencatatan dan pelaporan keluarga miskin, Penyuluhan kepada masyarakat miskin, Pemberian KB gratis untuk masyarakat miskin. Pendataan keluarga dilakukan oleh PPKBJ dengan dibantu oleh SUB PPKBJ, dalam melakukan pencatatan dan pelaporan akan dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat Jorong, nagari, Kecamatan/ Kota, tingkat provinsi dan Pusat. Setelah data terkumpul baru bisa terlihat yang akan menjadi sasaran dari program KB, selanjutnya dilakukanlah penyuluhan oleh PLKB dan di bantu oleh PPKBJ dan SUB PPKBJ. Penyuluhan yang dilakukan ada yang berkelompok dan ada perorangan yang dilakukan oleh kader dari rumah ke rumah. Selanjutnya dilakukanlah pemberian KB gratis untuk masyarakat miskin, pemberian KB gratis dapat dilakukan di Posyandu-posyandu, di Puskesmas dan di tempat pelayanan terpadu.
- 2. Dalam pelaksanaan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk maka ada beberapa Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin. Kendala Pendataan Keluarga Miskin, meliputi: a) Rendahnya Motivasi Kader, b) Berbedanya Indikator Masyarakat Miskin Menurut Instansi. Sedangkan kendala yang terjadi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat: a) Sedikitnya Jumlah

PKB di tingkat Kecamatan, b) Adanya Tantangan Di tengah Masyarakat, dan yang menjadi kendala dalam pemberian KB gratis untuk masyarakat miskin adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program KB.

3. Pendapat masyarakat miskin mengenai program KB, berbagai pendapat yang muncul dari masyarakat miskin yakni penggunaan KB membuat tubuh menjadi tidak sehat, tidak memiliki dana untuk ber KB dan tidak tahu ada KB gratis, Ber KB dilarang oleh Agama.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan sebuah saran sebagai berikut:

- upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, sebaiknya pelaksanaannya lebih sungguh-sungguh sehingga dapat tercapai tujuan dari program KB yakni salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu Agar pelaksanaan Program KB dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para kader sehingga para kader mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya.
- Agar pembinaan kepada masyarakat lebih intensif dan merata maka perlu
  di tambah PLKB (Pelaksana lapangan KB), sedikitnya jumlah PLKB di
  tingkat Kecamatan maka akan berdampak banyaknya masyarakat tidak
  memiliki pengetahuan tentang KB.
- Saran untuk PLKB, sebaiknya masyarakat miskin yang mempunyai kendala mengenai kesehatan dari dampak Penggunaan alat kontrasepsi

cepat dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang ditunjuk, sehingga tidak berdampak buruk terhadap masyarakat miskin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2005. Metodologi Penelitian. Padang
- Amrah Muslimah. 1986. *Keluarga Berencana (Patang berkala) Aspek Masalah Kependudukan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Bappeda dan Badan Statistik propinsi Sumatera Barat mengenai Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat tahun 2006
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Tahun 2006, 2007
- BKKBN Provinsi Sumbar. 1998. Kamus Istilah Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera. Padang
- Burhan Bungin. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dadang Juliantoro. 2000. 30 Tahun Cukup (Keluarga Berencana dan Hak Konsumen). Jakarta: Pustaka Harapan.
- Deddi Supriady Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan daerah. Jakarta: Pustaka Utama.
- Dickenson, J.P C.G, dkk. 1992. *Geografi Negara Berkembang*. Semarang. IKIP Semarang.
- Jhigan, M.L. 2004. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- J. Lexy Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- ----- 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Depdikbud Dirjen dikti: P2PLTK
- Mudrajad Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Nasir. 1985. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noli Amelia. 2007. Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Jumlah Kelahiran di Kecamatan Payakumbuh Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. (tidak dipublikasikan)